

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

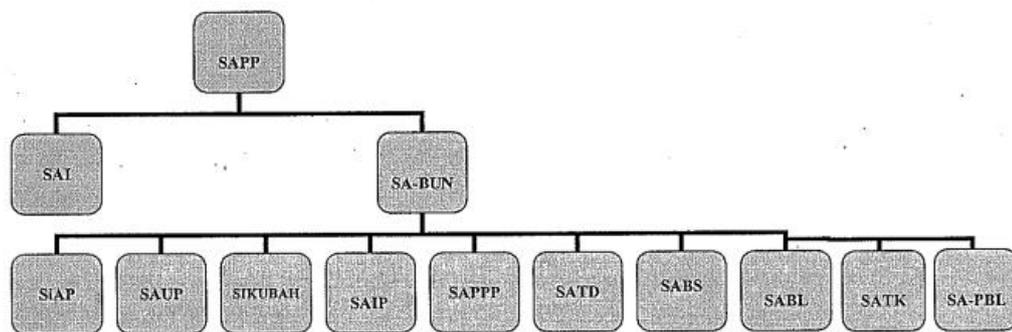
#### **2.1 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Menurut PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang kemudian disebut SAPP merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tersebut dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat.

SAPP sebagai sebuah sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan perwujudan dari amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut, SAPP dilaksanakan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi dua prinsip. Kedua prinsip tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi, pada saat itu laporan keuangan pemerintah dianggap masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti SAP yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.

SAPP terdiri dari dua sistem akuntansi. Hal ini sesuai dengan PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan PMK tersebut, SAPP terbagi menjadi dua yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Berikut disajikan lebih lanjut terkait dengan kerangka umum SAPP.

Gambar II. 1 Kerangka Umum SAPP



Sumber: Kementerian Keuangan (2013)

SABUN dan SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi. Prosedur ini dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Dalam ketentuannya, SABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN. Sementara itu, SAI dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI wajib dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal ini termasuk Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kedua sistem tersebut dirancang untuk memroses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya. Pemrosesan data transaksi keuangan pada SAI dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang Kementerian Negara/Lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat instansi telah sampai pada penggunaan SAKTI sebagai sebuah sistem yang terintegrasi.

## **2.2 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**

### **2.2.1 Pengertian SAKTI**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, SAKTI adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi yang terdiri dari beberapa modul dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Modul yang tersedia pada SAKTI sesuai dengan PMK No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan.

Dalam pengertian lain, menurut KPPN Majene (2013), SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh satker. Integrasi aplikasi SAKTI dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Kemudian, proses

bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul yang tersedia dalam suatu lingkup sistem aplikasi yaitu SAKTI.

SAKTI sebagai sebuah sistem terintegrasi menggunakan sistem *single entry point, single database*, dan akuntansi berbasis akrual. Kemudian, untuk periode transaksi dalam aplikasi SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited* (KPPN Metro, 2018).

### **2.2.2 Ruang Lingkup Penerapan SAKTI**

Menurut KPPN Metro (2018), SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada tingkat satker. Proses tersebut dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Kemudian, masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul yang terkait.

Berdasarkan PMK No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, ruang lingkup pelaksanaan penggunaan uji coba SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat di dalam SAKTI yaitu sebagai berikut.

#### **a. Modul Penganggaran**

Modul ini berfungsi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Selain itu juga terdapat proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun anggaran.

#### **b. Modul Komitmen**

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut meliputi pencatatan data *supplier*, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima

(BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN. Jadi, modul ini dapat berguna untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran.

c. Modul Bendahara

Modul ini berfungsi untuk melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bendahara.

d. Modul Pembayaran

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengajuan pembayaran yang dilaksanakan atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

e. Modul Persediaan

Modul ini berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan terkait dengan persediaan.

f. Modul Aset Tetap

Modul ini berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). BMN tersebut dapat berupa aset tetap dan aset tak berwujud.

g. Modul Piutang

Modul ini berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di satker pengguna SAKTI.

h. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengintegrasian data jurnal dari seluruh modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Kemudian, pelaksanaan uji coba SAKTI didukung oleh:

- a. pengelolaan Sistem Administrasi SAKTI; dan
- b. pengelolaan Portal SAKTI.

### **2.2.3 Tujuan dan Manfaat SAKTI**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, SAKTI sebagai sebuah sistem yang terintegrasi bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi. Selain itu, SAKTI juga memiliki berbagai manfaat dalam penerapannya di lingkup satker. Menurut DJPB Kemenkeu (2021) dalam Azizah (2021), beberapa manfaat penggunaan aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut.

- a. Operasional pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif. Hal ini karena SAKTI mengintegrasikan satu siklus keuangan negara mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.
- b. Sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien, baik sumber daya keuangan berupa anggaran maupun non keuangan.
- c. Pelaksanaan konsolidasi data APBN Kementerian/Lembaga menjadi lebih cepat dengan transaksinya yang bersifat *real time* dan dengan akses *database* yang sama.
- d. Kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga mengalami peningkatan melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI. Hal ini membuat kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan konsisten sesuai SAP.
- e. Kualitas layanan pemerintah bisa segera pulih dan mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, *roll out* SAKTI tahun 2021 pada seluruh

Kementerian/Lembaga akan menjadi sebuah momentum untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang sempat terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, layanan pemerintah semakin mudah diakses dari mana pun dan kapan pun.

#### **2.2.4 Prinsip Dasar SAKTI**

Prinsip dasar SAKTI tercantum dalam PMK No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Beberapa prinsip dasar tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut.

1) Pasal 3

- a. SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Transaksi yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan dengan sistem elektronik.
- c. *Piloting* SAKTI dilaksanakan secara daring dengan menggunakan sistem *database* terpusat, *multi user* dan/atau *multi* satker.
- d. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan kewenangannya.
- e. Setiap perubahan data pada SAKTI akan tercatat dalam histori transaksi. Perubahan tersebut meliputi perubahan pengguna, waktu, dan data.
- f. Pengiriman data SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik.
- g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi SAKTI pada satker.

2) Pasal 4

- a. Periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi periode:
  - 1) Januari sampai dengan Desember;
  - 2) unaudited; dan
  - 3) audited.
- b. Pencatatan periode transaksi dan tanggal buku dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Januari sampai dengan Desember diberi kode periode 1 sampai dengan 12 dan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud;
  - 2) unaudited diberi kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember; dan
  - 3) audited diberi kode periode 14 dan tanggal buku 31 Desember.
- 3) Pasal 5
  - a. Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Proses ini dilakukan sebelum Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan periode tutup buku.
  - b. Dalam hal Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan tutup buku permanen maka modul lain secara otomatis akan tertutup untuk periode berikutnya.
  - c. Dalam hal terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku permanen maka transaksi dimaksud dicatat pada periode transaksi berikutnya.
  - d. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan *uji coba* SAKTI, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk tim atau kelompok kerja.

### **2.2.5 Proses dan Mekanisme Penerapan SAKTI**

Proses dan Mekanisme Penerapan atas uji coba SAKTI terbagi menjadi beberapa bagian yang diatur pada BAB V PMK No. 159/PMK.05/2018 tentang

Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Bagian kesatu adalah terkait Pengelolaan Sistem Administrasi SAKTI. Dalam bagian ini, terdapat beberapa penjelasan mulai dari pengguna SAKTI yang kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait tugas dan pihak yang terkait dengan pengguna SAKTI.

Pengguna SAKTI terdiri atas Administrator dan Operasional Modul yang mempunyai dan bertanggung jawab atas kode akses sesuai kewenangan pengguna. Administrator terdiri atas Administrator Pemelihara Sistem, Administrator Pusat, Administrator tingkat Kementerian Negara/Lembaga, dan Administrator Lokal. Keempat administrator tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain. Sementara itu, Operasional Modul terdiri atas Operator (melakukan perekaman data), Validator (melakukan pengujian/penelitian atas perekaman data), *Approver* (melakukan persetujuan atas perekaman data).

Kemudian, bagian kedua menjelaskan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan. Dalam hal ini, terdapat unit pengelolaan infrastruktur jaringan yang terdiri atas pengelolaan infrastruktur dan jaringan pada Kementerian Keuangan dan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Selanjutnya, bagian ketiga dan seterusnya menjelaskan terkait dengan modul yang terdapat dalam SAKTI. Modul pertama adalah modul penganggaran. Berbagai proses yang dilakukan di modul ini meliputi penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), penyusunan anggaran berupa Kertas Kerja atau RKAKL/DIPA, Standar Struktur Biaya, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Revisi Anggaran dan *Review* Revisi Anggaran. Kemudian, kewenangan pengguna pada modul ini dilaksanakan oleh

Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Modul selanjutnya adalah modul komitmen. Modul ini dapat melakukan pengelolaan data *supplier* dan kontrak. Proses pengelolaan data *supplier* meliputi aktivitas pembuatan dan pendaftaran, perubahan, dan penonaktifan data *supplier*, sedangkan proses pengelolaan data kontrak meliputi pembuatan dan pendaftaran, perubahan, dan pembatalan data kontrak.

Modul ketiga adalah modul bendahara. Dalam modul ini, kewenangan pengguna operator adalah melakukan perekaman, perubahan, dan penghapusan data transaksi bendahara melalui SAKTI. Kemudian pada modul ini, bendahara terdiri atas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Penerimaan. Ketiga bendahara tersebut memiliki tugas sesuai dengan kewenangan dalam melakukan penatausahaan transaksi untuk masing-masing bendahara. Kemudian, modul keempat adalah modul Pembayaran. Di modul ini terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu pencatatan SPP, penerbitan SPM, pencatatan SP2D, pencatatan RPD Harian, monitoring SPP, dan monitoring ADK SPM.

Modul kelima adalah modul persediaan. Modul persediaan dapat melakukan perekaman transaksi yang mencakup persediaan masuk dan keluar, koreksi, dan inventarisasi fisik. Dalam modul ini, metode pencatatan yang digunakan adalah perpetual. Kemudian untuk metode penilaiannya meliputi harga perolehan/satuan terakhir, harga rata-rata tertimbang (*weighted average*) dan *first-in first-out* (FIFO). Penetapan penggunaan metode penilaian tersebut mengikuti kebijakan yang

ditetapkan oleh unit yang berwenang dalam BMN dan/atau kebijakan laporan keuangan pemerintah.

Modul selanjutnya adalah modul aset tetap. Modul ini melakukan proses perekaman data transaksi BMN, KDP, Aset Tetap Renovasi, BMN Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga. Selain itu juga dilakukan pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), dan Daftar Barang Lainnya (DBL). Kemudian, melakukan perhitungan penyusutan/amortisasi secara otomatis, proses pembuatan data *summary* untuk keperluan pelaporan, penutupan periode bulanan, dan pencetakan buku/daftar, laporan, dan label BMN.

Modul Ketujuh adalah modul piutang. Modul piutang menatausahakan jenis transaksi piutang antara lain transaksi piutang PNBPN, transaksi piutang tagihan penjualan angsuran, dan transaksi piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Dalam modul ini, pengguna yang berwenang adalah operator.

Modul terakhir adalah modul akuntansi dan pelaporan. Proses yang dilakukan di modul ini yaitu migrasi saldo awal, jurnal transaksi, jurnal manual dan penyesuaian khusus, validasi atas pencatatan jurnal dan posting jurnal, pencatatan realisasi kinerja satker, monitoring jurnal, tutup buku dan monitoring tutup transaksi. Modul ini akan menghasilkan berbagai laporan yang digunakan dalam proses konsolidasi. Konsolidasi tersebut dilakukan pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

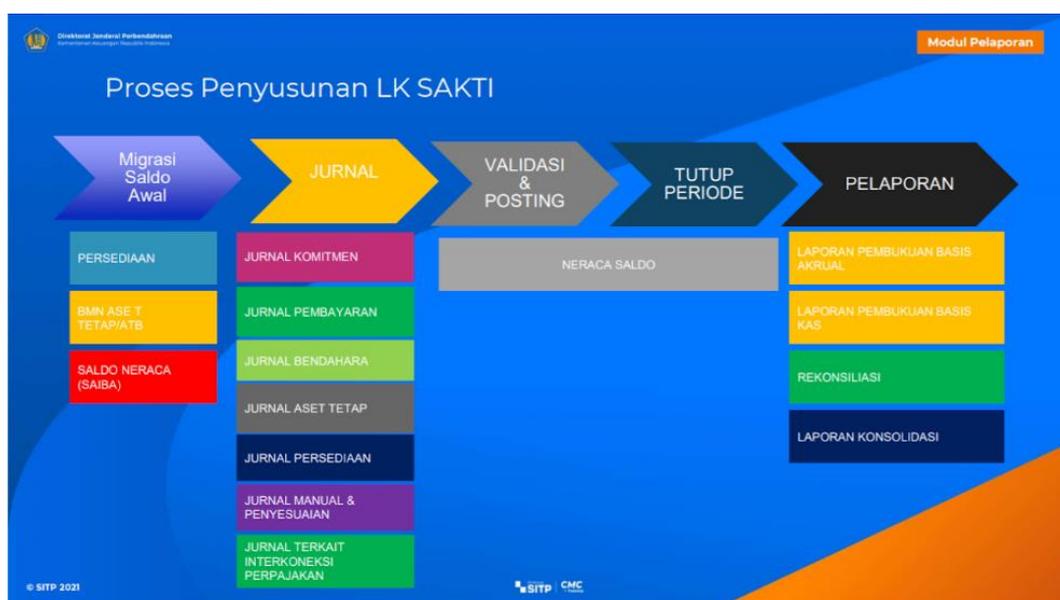
### **2.2.6 Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menggunakan SAKTI**

Penyusunan laporan keuangan pada aplikasi SAKTI dilakukan oleh modul akuntansi dan pelaporan/GLP sesuai dengan PMK 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Modul GLP memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup dari modul ini meliputi migrasi data saldo awal, jurnal transaksi, jurnal manual dan penyesuaian khusus, validasi dan posting jurnal, monitoring jurnal, tutup buku dan monitoring tutup transaksi, pencetakan laporan keuangan, dan pencatatan dan laporan realisasi kinerja satker. Kemudian, modul ini akan menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan seperti laporan buku besar, neraca percobaan, laporan operasional, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran belanja, laporan realisasi anggaran pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara dan hibah, laporan realisasi pengembalian pendapatan negara dan hibah, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi neraca dan *sub-ledger*, laporan kinerja satker, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan ketersediaan dana.

Dalam pelaksanaannya, pengguna GLP terdiri atas operator satuan kerja dan operator konsolidator. Operator satuan kerja bertugas melakukan perekaman, perubahan, validasi dan posting, monitoring transaksi, tutup periode, dan penyajian/pencetakan. Sementara itu, operator konsolidator bertugas melakukan pencetakan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan tingkat konsolidasiannya. Operator konsolidator terdiri atas konsolidator tingkat wilayah, eselon I, dan K/L.

Proses penyusunan laporan keuangan pada SAKTI melalui beberapa tahapan. Berikut merupakan skema proses penyusunan laporan keuangan pada SAKTI.

Gambar II. 2 Skema Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI



Sumber: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (2021)

Pada gambar tersebut, proses penyusunan laporan keuangan pada SAKTI dimulai dari migrasi data saldo awal. Migrasi data saldo awal bertujuan untuk menjaga kesinambungan data dari data saldo akhir neraca tahun sebelumnya.

Proses selanjutnya adalah Jurnal Buku Besar. Pada proses ini diperlukan berbagai jurnal dari modul sebelumnya yaitu jurnal komitmen, jurnal pembayaran, jurnal bendahara, jurnal persediaan, jurnal aset tetap, jurnal piutang, jurnal terkait interkoneksi perpajakan, dan jurnal manual dan penyesuaian.

Aplikasi SAKTI menerapkan konsep 2 buku besar (*ledger*) yaitu *accrual ledger* dan *cash ledger*. *Accrual ledger* digunakan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berbasis akrual yang dilakukan perjurnalalan pada setiap titik pengakuan akrual dengan menggunakan pendekatan *due to/due from* (ditagihkan

kepada/diterima dari entitas lain). Buku besar ini digunakan untuk mendukung pelaporan berbasis akrual seperti Neraca, LO, dan LPE.

Sementara itu, *cash ledger* digunakan untuk membukukan transaksi berbasis kas yang dilakukan perjualan pada saat terjadi kas masuk/keluar dari BUN dengan menggunakan pendekatan *due to/due from* (ditagihkan kepada/diterima dari entitas lain terutama terkait dengan pembayaran/penerimaan BUN). Buku besar ini digunakan untuk mendukung pelaporan berbasis kas seperti LRA. Selain kedua itu, SAKTI juga menerapkan *ledger single entry* untuk mencatat transaksi atas jurnal anggaran (estimasi dan *allotment*), jurnal komitmen (*encumbrance*), dan jurnal *sub-ledger* bendahara.

Kemudian, proses ketiga adalah validasi dan posting. Operator modul GLP melakukan validasi atas pencatatan jurnal melalui menu validasi jurnal, sedangkan untuk posting jurnal dilakukan melalui menu posting jurnal. Validasi dan posting jurnal tersebut digunakan untuk menghasilkan neraca saldo sebagai dasar pencetakan laporan keuangan.

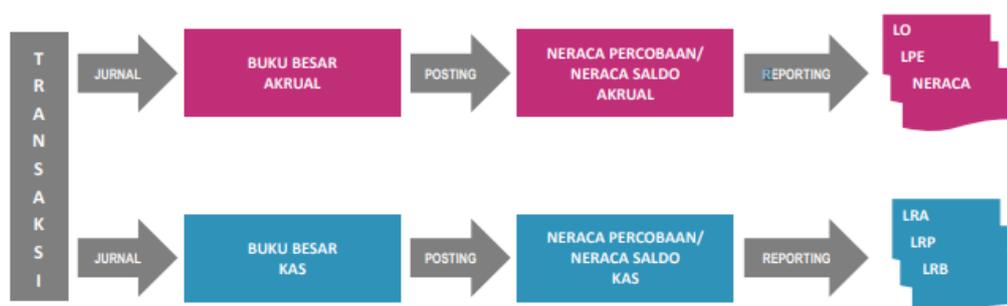
Setelah itu, modul GLP akan melakukan tutup periode atau tutup buku. Proses ini berfungsi untuk membatasi agar modul tidak bisa menambah transaksi/jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup. Selain itu juga berfungsi untuk mengirim nilai saldo akhir neraca percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal.

Tutup buku yang dilakukan pada modul GLP harus memenuhi dua syarat yaitu jurnal pada periode tersebut telah diposting dan periode sebelumnya berstatus tutup.

Kemudian dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis tutup buku yaitu tutup buku sementara dan tutup buku permanen (semesteran).

Proses terakhir adalah pelaporan. Proses ini akan menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan yaitu LO, LPE, dan Neraca untuk yang berbasis akrual dan LRA, LRP, dan LRB untuk yang berbasis kas yang kemudian akan dilakukan rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon LK. Ilustrasi terkait dengan proses pembentukan laporan adalah sebagai berikut.

Gambar II. 3 Proses Pembentukan Laporan



Sumber: KPPN Metro (2018)

Selain menghasilkan laporan seperti yang disajikan di ilustrasi tersebut, terdapat juga pelaporan lainnya berupa Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan *Sub-Ledger*, Laporan Ketersediaan Dana (FA), dan Laporan Transaksi Valas.

## 2.3 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean

### 2.3.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Anggraeni dan Irviani (2017), sistem informasi didefinisikan sebagai sebuah sistem yang ada dalam organisasi. Sistem tersebut mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi kerja organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi organisasi. Oleh karena itu, sistem

informasi bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Kadir (2014) menyimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen. Komponen tersebut terdiri dari manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Dalam hal ini, ada sesuatu yang diproses yaitu berupa data yang berubah menjadi informasi. Kemudian, hasil pemrosesan berupa informasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup berbagai komponen yang ada di dalam sebuah organisasi. Keberadaan sistem informasi dapat mendukung kegiatan operasional sehingga dapat memperlancar kinerja suatu organisasi. Pada akhirnya, hasil dari sistem tersebut yang berupa informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang terkait dengan organisasi tersebut.

### **2.3.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan SIA Pemerintah**

Menurut Marina *et al.* (2017), Sistem Informasi Akuntansi atau SIA merupakan jaringan yang meliputi seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat. Jaringan tersebut digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai alat pengambilan keputusan. Pendapat lain menyatakan bahwa SIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai proses seperti mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan bagi pengambil keputusan (Roomney dan Steinbart, 2018). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Moscove dalam Zamzami *et al.* (2021), yaitu

merupakan suatu komponen dari organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak eksternal maupun internal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIA merupakan sistem yang menghasilkan informasi penting untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan baik dari pihak eksternal maupun internal.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Roomney dan Steinbart (2018), SIA memiliki enam komponen. Berbagai komponen tersebut juga menjadi bagian yang terdapat di dalam Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP). Keenam komponen tersebut adalah sebagai berikut.

a. Orang

Sebagai pengguna dari sistem, orang dalam lingkup pemerintah adalah pejabat pengelola keuangan, pejabat perbendaharaan, operator, validator, *approver*, dan berbagai pihak yang terkait dengan penggunaan sistem.

b. Prosedur dan Instruksi

Komponen ini menjadi panduan yang digunakan untuk mengumpulkan, memroses, dan menyimpan data. Contohnya adalah peraturan, proses bisnis, dan manual aplikasi.

c. Data

Bagian ini berisi tentang hal-hal yang mencakup organisasi dan aktivitas bisnis. Bentuk data dapat berupa dokumen seperti SPP/SPM, BAST, BPN, dan sebagainya.

d. Perangkat Lunak (*Software*)

*Software* merupakan sarana yang digunakan untuk memroses data yang telah diperoleh. Beberapa *software* yang dapat digunakan adalah SPAN, SAKTI, SAS, MPN, DMFAS, dan sebagainya.

e. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Infrastruktur TI terdiri dari komputer, *peripheral devices* seperti *scanner barcode*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA (Intranet Kemenkeu dan lain-lain).

f. Pengendalian Internal dan Ukuran Keamanan.

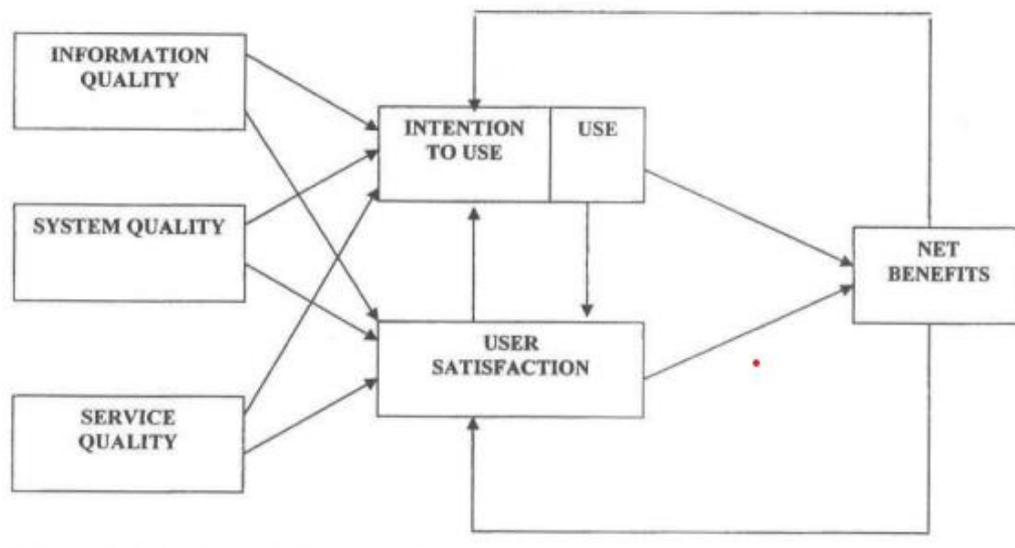
Hal ini diperlukan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi. Contohnya adalah dengan melakukan pengaturan *role user*, pengujian tagihan, validasi data, enkripsi data, dan lain sebagainya.

SIAP merupakan bentuk dari penerapan sistem informasi akuntansi di lingkup pemerintahan. Sebagai sebuah sistem, SIAP memiliki fungsi sebagai alat atau media untuk mengumpulkan dan menyimpan data, mengolah data menjadi informasi, dan memberikan pengendalian yang memadai. Kemudian dalam penerapannya, SIAP yang baik dapat menambah nilai organisasi dengan cara meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, meningkatkan efisiensi, membagikan pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan/layanan, meningkatkan struktur pengendalian internal, dan meningkatkan pengambilan keputusan (Roomney dan Steinbart, 2018).

### 2.3.3 Faktor-Faktor Kesuksesan Sistem Informasi Menurut DeLone dan McLean

Kesuksesan sistem informasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut DeLone dan McLean (2003), faktor-faktor kesuksesan atas penerapan sebuah sistem informasi dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

Gambar II. 4 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003)



Sumber: DeLone dan McLean (2003)

Berdasarkan model kesuksesan tersebut, DeLone dan McLean (2003) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kualitas memiliki tiga dimensi utama yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Masing-masing dimensi harus diukur atau dikendalikan secara terpisah. Hal ini karena secara tunggal atau bersama-sama, mereka akan memengaruhi dimensi berikutnya yaitu penggunaan dan kepuasan pengguna.

Pada dimensi penggunaan, terdapat kesulitan dalam menafsirkan aspek multidimensi. Berkaitan dengan hal tersebut, DeLone dan McLean (2003)

menyarankan minat penggunaan sebagai alternatif untuk menjadi ukuran yang bermanfaat dalam beberapa konteks. Dalam hal ini, minat penggunaan adalah sikap, sedangkan penggunaan adalah perilaku. Keduanya terlihat sulit untuk diukur sehingga para peneliti mungkin lebih memilih untuk menggunakan dimensi penggunaan dalam melakukan penelitian.

Penggunaan dan kepuasan pengguna merupakan dimensi yang saling terkait erat. Penggunaan harus mendahului kepuasan pengguna dalam suatu proses yang logis. Akan tetapi, pengalaman positif dengan penggunaan akan menghasilkan kepuasan pengguna yang lebih besar dalam pengertian kausal. Demikian pula, peningkatan kepuasan pengguna juga akan menyebabkan peningkatan niat untuk menggunakan/minat penggunaan, dan kemudian berpengaruh juga ke penggunaan.

Dimensi penggunaan dan kepuasan pengguna akan menghasilkan manfaat bersih. Ketika manfaat bersih positif, misalnya sistem informasi akan terus dilanjutkan, hal tersebut akan memengaruhi atau meningkatkan penggunaan dan kepuasan pengguna berikutnya. Begitupun sebaliknya, jika manfaat bersih negatif, kurangnya manfaat positif dapat disebabkan oleh penurunan penggunaan atau penghentian dari sistem tersebut. Jadi, hubungan antara dimensi-dimensi tersebut saling terkait satu sama lain seperti yang telah digambarkan melalui panah pada ilustrasi di atas.

#### **2.3.4 Variabel dan Indikator Pengukuran Kesuksesan Sistem Informasi**

Berdasarkan poin sebelumnya, terdapat enam variabel yang kemudian digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kualitas Informasi

Menurut O'Brien (2005) dalam Rukmiyati & Budiarta (2016), kualitas informasi merupakan tingkat di mana informasi memiliki karakteristik berupa isi, bentuk, dan waktu. Karakteristik tersebut memberikan nilai untuk para pemakai akhir tertentu.

b. Kualitas Sistem

Menurut Jogiyanto (2007) dalam Rakhmadian et al. (2017), kualitas sistem didefinisikan sebagai kualitas teknis dari suatu sistem informasi. Kualitas sistem berarti kualitas kombinasi dari *hardware* dan *software*.

c. Kualitas Layanan

Menurut Johanshasi (2011) dalam Permana (2013), kualitas layanan adalah pemenuhan dari harapan konsumen atau kebutuhan konsumen. Pemenuhan tersebut membandingkan antara hasil dengan harapan.

d. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan didefinisikan sebagai suatu proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian dalam menggunakan sesuatu seperti sarana atau barang. Dalam hal ini, penggunaan dapat diartikan sebagai proses atau cara dalam menggunakan sistem informasi.

e. Kepuasan Pengguna

Menurut Supriyatna (2015), kepuasan pengguna menggambarkan keselarasan antara harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu sistem. Sistem ini menjadi tempat bagi orang tersebut untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kepuasan

pengguna sistem informasi merupakan salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan atas penerapan sebuah sistem informasi. Kepuasan tersebut memberikan penilaian tentang kinerja suatu sistem informasi dan keselarasan dengan tujuan penggunaannya

#### f. Manfaat Bersih

Krisdiantoro et al. (2018) menjelaskan bahwa manfaat bersih merupakan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh individu maupun organisasi dalam penggunaan sistem. Manfaat individu ini dapat dilihat dari intensitas penggunaan sistem yang mengalami peningkatan dan adanya perasaan puas yang muncul dari penggunaan sistem. Hal ini dapat memberikan nilai tambah berupa peningkatan kinerja individu bahkan organisasi.

Dalam penelitian ini, terdapat berbagai indikator yang berkaitan dengan pengujian atas variabel-variabel kesuksesan sistem informasi tersebut. Indikator yang digunakan oleh penulis diadaptasi dengan menggunakan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu DeLone dan McLean (2003), Kwaak *et al.* (2018), dan Aldholay *et al.* (2018). Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

#### a. Variabel Kualitas Informasi

1. Mutakhir/terkini (Bailey dan Pearson, 1983).
2. Tepat/akurat (Bailey dan Pearson, 1983).
3. Berguna/bermanfaat/relevan (DeLone dan McLean, 2003).
4. Lengkap/komprehensif (Bailey dan Pearson, 1983).
5. Informasi yang cukup (Aldholay *et al.*, 2018).

b. Variabel Kualitas Sistem

1. Mudah digunakan (Bailey dan Pearson, 1983).
2. Mampu beradaptasi secara fleksibel (Bailey dan Pearson, 1983).
3. Dapat dipahami (Aldholay, 2018).
4. Memungkinkan pertukaran data (Kwahk *et al.*, 2018).
5. Beroperasi secara stabil tanpa gangguan (Kwahk *et al.*, 2018).
6. Mampu menjawab dengan cepat (Bailey dan Pearson, 1983).

c. Variabel Kualitas Layanan

1. Cepat/tanggap/responsif (DeLone dan McLean, 2003).
2. Praktis/fungsional (DeLone dan McLean, 2003).
3. Interaktif (DeLone dan McLean, 2003).

d. Variabel Penggunaan

1. Frekuensi penggunaan (Aldholay *et al.*, 2018).
2. Lamanya penggunaan (Aldholay *et al.*, 2018).

e. Variabel Kepuasan Pengguna

1. Memenuhi harapan (Aldholay *et al.*, 2018).
2. Puas secara keseluruhan (Aldholay *et al.*, 2018).
3. Senang (Aldholay *et al.*, 2018).
4. Semangat (Kwahk *et al.*, 2018).
5. Gembira (Kwahk *et al.*, 2018).

f. Variabel Manfaat Bersih

1. Menghemat waktu (Aldholay *et al.*, 2018).
2. Menghemat tenaga (Aldholay *et al.*, 2018).

3. Menghemat biaya (Aldholay *et al.*, 2018).
4. Memperbaiki kinerja (Aldholay *et al.*, 2018).
5. Meningkatkan keefektifan (Aldholay *et al.*, 2018).
6. Menghilangkan kesalahan (Aldholay *et al.*, 2018).
7. Merealisasikan target (Aldholay *et al.*, 2018).
8. Memperoleh pengetahuan baru (Aldholay *et al.*, 2018).
9. Memperoleh keterampilan baru (Aldholay *et al.*, 2018).
10. Menimbulkan inovasi (Aldholay *et al.*, 2018).

#### **2.4 Penelitian-Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian terkait dengan SAKTI telah dilakukan. Penelitian tersebut diawali dengan tujuan untuk menguji diterimanya SAKTI. Pada tahun 2017, dalam penelitian yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan TAM, Prabowo (2017) memberikan kesimpulan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan SAKTI. Selain itu, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI oleh para pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan SAKTI.

Kemudian, penelitian terkait SAKTI mulai berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan atas penerapan SAKTI. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang bervariasi terkait dengan

kesuksesan atas penerapan SAKTI. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan model DeLone dan McLean.

Penelitian oleh Pambudi dan Adam (2018) dengan lima variabel pada satuan kerja di provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan SAKTI berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih SAKTI. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amriani dan Iskandar (2019) dengan lima variabel yang sama pada BPPK Makassar menghasilkan kesimpulan yang sedikit berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan tidak terbukti dan tidak dapat diterima. Dalam penelitian tersebut, kualitas sistem mempengaruhi kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna juga mempengaruhi manfaat bersih. Sementara itu, kualitas informasi dan kualitas layanan secara terintegrasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna SAKTI.

Kemudian, penelitian lain yang telah dilakukan oleh Sihotang (2020) dengan empat variabel pada KPPN Sumatera Utara menunjukkan bahwa implementasi SAKTI secara empiris telah berhasil. Semua hipotesis yang diajukan terbukti dan diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan mempengaruhi nilai tertinggi. Penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa ada efek positif dari kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SAKTI. Namun, penelitian yang dilakukan oleh At-Tamimi dan Siregar (2021) dengan empat variabel yang sama pada Kementerian Sekretariat Negara memberikan hasil yang sedikit berbeda. Dari empat hipotesis yang diajukan, tidak

semuanya terbukti dan dapat diterima. Penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan dalam penelitian ini kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna *web* SAKTI.